

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMBINAAN USAHA KECIL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA LAMONGAN

**Muhamad Rifai
Ugy Soebiantoro**

Abstrak: Kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam kenyataannya akan mengakibatkan munculnya sektor formal maupun sektor informal. Sektor informal umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas serta sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Menyadari akan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2003 tentang arah kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui program dan kebijakannya yang mengatur, menata, melindungi, serta membina usaha kecil terutama pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Lamongan tidak hanya bermuara pada perbaikan ekonomi masyarakat saja, namun secara lebih luas diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam jangka panjang para pengusaha kecil tersebut mampu menjadi pengusaha yang mandiri, maju, dan berkembang.

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Usaha Kecil, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang bermuara kepada upaya dan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan didalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha besar, menengah, kecil, dan koperasi diantaranya adalah melalui pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dualisme kota dan desa telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sekto informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal yang positif dalam perekonomian, tetapi juga negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian lainnya tanpa bekal ketrampilan yang dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya (Harsiwi, 2002)

Muhamad Rifai adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Ugy Soebiantoro adalah Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UPN Veteran Surabaya.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan “ekonomi bawah tanah” (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Daerah kabupaten maupun kota yang mempunyai pusat pemerintahan di Lamongan, sudah barang tentu akan terdapat banyak pelaku ekonomi mulai dari usaha besar (industri/perdagangan), usaha menengah, dan usaha kecil seperti industri rumah tangga maupun Pedagang Kali Lima (PKL). Dari berbagai pelaku ekonomi itulah yang kemudian akan membentuk dan menghiasi wajah pusat pemerintahan kabupaten atau kota menjadi maju, berkembang dengan keindahan dan kerapian yang tertata dengan baik atau bahkan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya kumuh dan semrawut.

PKL (*street trading/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. PKL adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha-usaha tersebut dilaksanakan pada suatu tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja dengan modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, akan tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau suplier yang memasio barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti cuma sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Dengan demikian kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).

Mereka yang masuk dalam kategori PKL ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*) (Soemadi, 1993). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa PKL menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha PKL ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi PKL berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978).

Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pusat kotanya terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 12 desa yang tergabung dalam satu wilayah Pemerintahan Kecamatan Lamongan (Kecamatan Kota), tampak giat untuk membangun dan menata keindahan kotanya agar kelihatan rapiu dan bersih/enak dipandang mata. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Lamongan mengharapakan banyak investor baik lokal, regional, nasional dan asing yang menanamkan modalnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang baru.

Usaha kecil PKL pada dasarnya dapat dibina atau diatur didalam menjalankan kegiatan usaha serta dikembangkan keberadaannya dengan tujuan agar: Memahami dan mentaati kebijakan pemerintah, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga/masyarakat pengusaha yang menjalankan kegiatan usahanya di tengah-tengah kota,

meningkatkan kesadaran untuk ikut berpartisipasi membangun dan memajukan daerah atau kotanya, mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, dan mampu menjadi usaha yang mandiri, maju, dan berkembang.

Sedangkan masalah inti dari sistem permasalahan yang ada pada usaha kecil PKL di kota Lamongan adalah: Kebijakan pemerintah, pembinaan usaha kecil, pemanfaatan/ penggunaan fasilitas umum, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendapatan PKL, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari peranan sumber daya alam dan lingkungan pengelolaannya pada suatu negara baik itu menggambarkan bagaimana keadaan sumber daya alam dan bagaimana lingkungan atau masyarakat / pengelolanya mengembangkan menjadi suatu tatanan pada suatu negara.

Menurut Irawan dan Suparmoko (1997) sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya *"An Inquiry Into The Nature and of The Wealth of National"* para ahli melanjutkan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi negara. Pada abad 20, timbul pertanyaan mengapa tingkat perkembangan di banyak negara tidak seperti yang diharapkan. Paham liberal telah dihadapkan pada perkembangan yang pesat di Rusia. Dengan adanya kejadian tersebut, maka penyelidikan mengenai pembangunan mempunyai arti praktis dan penting, terlebih setelah Perang Dunia II berakhir. Ekonomi Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), tingkat teknologi, keadaan pasar, dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri.

Pengertian Pembinaan Usaha Kecil

Pembinaan usaha kecil adalah Program-Program Pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan pada Usaha Kecil Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Lamongan dalam bentuk : Pengembangan usaha, pelatihan, sosialisasi, pemberian bantuan, dan lain sebagainya.

Menurut Irawan dan Suparmoko (1997), untuk strategi pengembangan pasar dalam negeri, tersedianya sumber daya alam sebagai bahan mentah merupakan prasyarat utama. Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup, tenaga kerja dengan skill yang memadai, maka pengembangan sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. Dengan perkataan lain barang produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok/ masyarakat yang melakukan kegiatan atau aktifitasnya sebagai PKL di kota Lamongan. Lokasi penjualan atau tempat mangkal para PKL di kota Lamongan antara lain : Alon-alon kota, sekitar Pasar Tingkat (Pasar Plasa), pasar umum di kelurahan Sidoharja, Rumah Sakit Sugiri, Pasar Lamongan Raya, pasar ikan, terminal, dan tempat lain yang strategis.

Pada penelitian ini, jumlah populasi PKL di kota Lamongan diperkirakan sebanyak 240. Sampel diambil sebesar sepertiga atau 33,3% dari populasi adalah sebanyak 80 PKL. Metoda pengambilan sampel (Teknik Sampling) yang dipakai yaitu sistem *Random Sampling* (acak). Teknik random sampling adalah mengambil sampel tanpa pandang bulu, artinya semua individu dalam populasi mempunyai kemungkinan yang sama atau diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa opini subyek populasi (orang/masyarakat) yaitu para pengusaha kecil PKL di kota Lamongan. Opini yang dimaksud secara individu masing-masing para pedagang maupun kelompok (bagi yang sudah terbentuk kelompok atau paguyuban). Adapun data sekunder berupa data yang diperoleh peneliti melalui bukti-bukti, catatan-catatan, laporan-laporan yang dipublikasikan maupun tidak, majalah, buletin, surat kabar, dan lain sebagainya.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sumber data internal maupun eksternal. Sumber data internal diperoleh dari populasi yaitu PKL di kota Lamongan, sedangkan sumber data eksternal diperoleh dari pihak lain atau instansi yang berwenang mengambil kebijakan maupun yang memberi pembinaan. Pada penelitian ini instrumen yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Angket (Kuisisioner). Pada penelitian ini dibagikan 80 eksemplar angket kepada responden yang berisi pertanyaan tentang kebijakan pemerintah dan pembinaan usaha kecil oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan terhadap usaha kecil PKL.
2. Wawancara (Interview). Sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung kepada obyek penelitian yaitu PKL di kota Lamongan dan jawaban responden dicatat (direkam).
3. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung seluruh kegiatan yang dilakukan para PKL di kota Lamongan mulai dari lokasi, cara penataan (lingkungan), jenis barang yang diperdagangkan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya.

Metode analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Lamongan adalah salah satu wilayah di Jawa Timur dengan luas 1.182,8 km². Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dengan 463 desa dan kelurahan. Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar baik ditinjau dari segi SDA maupun SDM. Potensi pada sektor ekonomi yang cukup menonjol selain pertanian, peternakan, dan perikanan adalah industri rumah tangga serta perdagangan pada skala kecil yang lebih dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL adalah sejalan dengan keberadaan atau perkembangan dan kepadatan penduduk suatu kota itu sendiri. Kota yang semakin berkembang diakibatkan jumlah penduduk yang semakin bertambah akan mengakibatkan kota semakin padat dan lahan pemukiman semakin sempit, lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas, meningkatnya angka pengangguran, sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda.

Usaha kecil PKL di Kabupaten Lamongan khususnya di kota, keberadaannya bukan berarti mereka memiliki lahan, akan tetapi para PKL di Lamongan mayoritas dari ekonomi lemah dan sebagian mereka urbanisasi dari desa-desa disekitar kota Lamongan. Keberadaan mereka sebagai PKL di kota Lamongan karena mendekati pasar dan barang yang banyak diperdagangkan seperti nasi, bakso, buah-buahan, mie, makanan ringan, dan lain sebagainya.

Keberadaan PKL di kota Lamongan sangat tidak tepat dan melanggar ketentuan karena melakukan suatu kegiatan usaha yang bukan pada tempatnya. Selain itu keberadaan PKL didalam melaksanakan aktifitasnya tidak beraturan, kumuh, kotor, dan mengganggu

kepentingan umum. Sementara pada sisi lain bila dilarang mereka akan kehilangan mata pencaharian dan berdampak pada semakin meningkatnya angka pengangguran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu peningkatan pada tindak kekerasan atau kejahatan.

Dihadapkan pada situasi yang dilematis, Pemerintah Kabupaten Lamongan semenjak tahun 2000 telah mulai memikirkan tentang keberadaan PKL. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan instansi terkait lain, PKL tidak perlu dilarang untuk berjualan akan tetapi ditertibkan atau diatur dan diberikan tempat/lokasi agar tampak rapi serta diberikan pembinaan baik berupa sosialisasi, pelatihan, maupun bantuan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lokasi kegiatan PKL di kota Lamongan tersebar pada beberapa tempat antara lain sekitar alon-alon kota, pasar Lamongan Plasa atau Pasar Baru, pasar Lamong Raya dan Lamongan Indah, terminal kota, pasar ikan (tempat pelelangan ikan), Rumah Sakit dr. Sugiri, pasar Sidoharjo, arena olahraga (stadion Surajaya), dan di sekitar kanan maupun kiri jalan raya di kota Lamongan. Jenis usaha PKL di kota Lamongan cukup beraneka ragam mulai dari makanan, minuman, pakaian, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Sedangkan waktu melakukan aktifitas usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing PKL.

Tabel 1 : Lokasi Usaha dan Aktivitas Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Lamongan

No	Lokasi Usaha	Aktivitas Usaha	Keterangan
1.	Alon-alom Kota Lamongan	Sore / malam hari, pkl 15.00 - 02.00 WIB	
2.	Lamongan Plaza / Pasar baru	Pagi - Malam hari, pkl 07.00 - 24.00 WIB	
3.	Pasar Lamongan Raya dan Lamongan Indah	Pagi - Malam hari, pkl 07.00 - 24.00 WIB	
4.	Terminal Lamongan	Pagi - Sore hari, pkl 07.00 - 18.00 WIB	
5.	Pasar ikan / Pelelangan ikan Lamongan	Pagi - Siang hari, pkl 07.00 - 14.00 WIB	
6.	Rumah Sakit dr. Sugiri, Muhammadiyah II	Selama 24 jam	
7.	Pasar Sidoharjo Lamongan	Bervariasi ; Pagi pkl. 07.00 - 12.00 Sore pkl. 14.00 - 02.00	Utk PKL yang sore / malam areal parkir
8.	Stadion Lamongan	Pada saat ada kegiatan di Stadion saja	
9.	Trotoir Jalan Raya (selain jalan protokol)	Bervariasi tergantung dari kemauan penjual, barang yang dijual dan aktivitas masyarakat umum	

Sumber : Dinas Perindagkop. Kab. Lamongan dan Hasil Observasi.

Dari jumlah populasi sebanyak 240 PKL, 33,3% atau 80 PKL dijadikan sampel yang dipilih dengan menggunakan metode random sampling (acak). Alasan pengambilan sampel secara acak, sebab jenis dan karakteristik populasi sama yaitu semua merupakan PKL, sehingga semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Keberadaan populasi dalam hal ini PKL di kota Lamongan disajikan dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2 : data Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lamongan Tahun 2005

No	Lokasi / Tempat	Nama Kelompok	Jumlah	Ket.
1.	Alon alon Kota	Paguyuban PKL Alon-alon	90 org.	
2.	Pasar Lamongan Plaza / Baru	Kelompok 25 Kelompok 27	25 org. 27 org.	
3.	Pasar Sidoharjo	Paguyuban Parkir dan PKL Pasar Sidoharjo (P4S)	25 org.	
4.	Pasar Ikan / TPI	-	15 org.	
5.	Pasar lamong Raya dan Lamongan Indah	-	15 org.	
6.	Terminal	-	15 org.	
7.	RSUD dr. Sugiri	-	8 org.	
8.	Stadion Surajaya	-	7 org.	
9.	Trotoir Jalan Raya	-	63 org.	
Jumlah :			240 org.	

Sumber : Dinas Perindagkop. Kab. Lamongan dan Hasil Observasi

Adapun perkembangan PKL di kota Lamongan 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel 3, sebagai berikut :

Tabel 3 : Data Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Lamongan 2005

No	Tahun	Jumlah (Orang / PKL)	Meningkat (Menurun)	Keterangan
1.	2001	175	-	
2.	2002	185	5,4%	
3.	2003	200	7,50%	
4.	2004	215	7%	
5.	2005	240	10,40%	

Sumber : Dinas Perindagkop. Kab.Lamongan

Untuk perkembangan pendapatan yang diperoleh PKL di kota Lamongan, yaitu berupa pendapatan kotor atau laba/keuntungan kotor dikurangi pajak atau retribusi, iuran kelompok dan lain sebagainya, menjadi pendapatan bersih atau laba bersih. Untuk mengetahui pendapatan PKL di kota Lamongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 (empat)

Tabel 4 : Data Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lamongan
(Pendapatan PKL di Kota Lamongan per-Bulan, dengan hari kerja = 26 hk)

Jumlah Responden	Jumlah Pendapatan Kotor (Rp.)	Jumlah Retribusi (Rp.)	Jumlah Iuran Kelompok (Rp.)	Jumlah Pendapatan (Rp.)
80 orang	65.410.000,-	1.200.000,-	2.400.000,-	61.810.000,-
Rata-rata	817.625,-	15.000,-	30.000,-	772.625,-

Sumber : Pengumpulan angket dari responden

Dari data di atas diketahui pendapatan kotor yang diterima PKL rata-rata sebesar Rp 817.625,-. Dengan demikian jumlah pendapatan kotor yang diterima populasi sebesar Rp 817.625,- x 240 PKL = Rp 196.230.000,- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari penarikan retribusi per bulan dari PKL adalah 240 x Rp 15.000,- = Rp 3.600.000,-. Hasil dana iuran kelompok yang dipergunakan untuk anggota sendiri meliputi lampu, kebersihan, keamanan, administrasi, dan lain sebagainya sebesar 240 x Rp 30.000,- = Rp 7.200.000,- Sedangkan pendapatan bersih yang diterima populasi dalam hal ini PKL di kota Lamongan sebesar 240 x Rp 772.625,- = Rp 185.430.000,-

PEMBAHASAN

Arah Kebijakan dan Tujuan Pembinaan Usaha Kecil PKL

Arah kebijaksanaan pemerintah dan pembinaan usaha kecil PKL yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : (1) Arah kebijaksanaan pemerintah (Dinas Perindagkop) sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan, arah kebijakan pemerintah terhadap Usaha Kecil atau Pedagang Kecil PKL di Kabupaten Lamongan, antara lain ; Melaksanakan perencanaan teknis pengendalian dan pelaksanaan pembinaan dibidang perdagangan (pasal 11 ; 1). Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan dibidang perdagangan (pasal 11 ; 2, butir a). Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan dalam mendukung pengembangan usaha dibidang perdagangan dalam negeri (pasal 11 ; 2, butir b). (2) Tujuan Pembinaan Usaha Kecil, tujuan pembinaan usaha kecil yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan adalah agar usaha kecil yang ada seperti halnya PKL dapat berkembang, maju, dan mandiri dalam arti mempunyai tempat usaha yang tetap serta memiliki ijin (legalitas),

Faktor Kebijakan Pemerintah

Faktor kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan yaitu menata lokasi atau tempat penjualan / aktivitas PKL di kota Lamongan, untuk memudahkan penarikan retribusi, pengaturan waktu kegiatan, untuk memudahkan pengawasan / monitoring kegiatan PKL dan supaya mereka mempunyai kepedulian terhadap lingkungan masing-masing serta lingkungan kegiatan perdagangan (lingkungan umum). Untuk mengetahui indikator-indikator kebijakan pemerintah dapat dilihat pada tabel 5 (lima) jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 5 : Jawaban Responden Indikator Kebijakan Pemerintah

Pertanyaan	Jawaban Responden dengan Skala dan Prosentase								Total	%
	4	%	3	%	2	%	1	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	9	22,25	61	76,25	10	12,5	-	-	80	100
2.	6	7,5	61	76,25	13	16,5	-	-	80	100
3.	4	5	60	75	16	20	-	-	80	100
4.	20	25	54	67,5	6	7,5	-	-	80	100
5.	-	-	41	51,25	32	40	7	8,75	80	100
Jml.	39		277		77		7		400	
Rata ²	7,8	9,75	55,4	69,25	15,4	19,25	1,4	1,75	80	100

Sumber : data primer diolah

Pada pertanyaan pertama dari responden sebanyak 80 orang PKL diperoleh hasil sebagai berikut : Yang menyatakan sangat setuju 9 responden = 11,25%, setuju 61 responden = 76,25%, jurang setuju 10 responden = 12,5%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan kedua diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 6 responden = 7,5%, setuju 61 responden = 76,25%, kurang setuju 13 responden = 16,25%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan ketiga diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 4 responden = 5%, setuju 60 responden = 75%, kurang setuju 16 responden = 20%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan keempat diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 20 responden = 25%, setuju 54 responden = 67,5%, kurang setuju 6 responden = 7,5%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan kelima diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 0 = 0%, setuju 41 responden = 51%, kurang setuju 32 responden = 40%, dan tidak setuju 7 responden = 8,75%.

Dengan demikian diperoleh hasil prosentase rata-rata jawaban responden sebagai berikut : Pertama 69,25% responden setuju, kedua 19,25% kurang setuju, ketiga 9,75% sangat setuju, dan keempat 1,75% responden menyatakan tidak setuju. Artinya dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terhadap PKL di kota Lamongan sebagian besar menyatakan setuju.

Faktor Pembinaan Usaha Kecil

Faktor pembinaan usaha kecil yang diterapkan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan yaitu : Untuk menambah wawasan an ilmu pengetahuan bagi PKL di kota

Lamongan, memberikan bantuan baik yang berupa peralatan, modal kerja atau modal usaha, untuk memudahkan pembinaan dan pemberian fasilitas maka perlu adanya kelompok / perkumpulan maupun paguyuban, untuk memudahkan pemerintah didalam pengembangan dan evaluasi kegiatan dan untuk mengetahui dampak terhadap pendapatan serta perkembangan PKL itu sendiri. Untuk mengetahui indikator-indikator kebijakan pemerintah dapat dilihat pada tabel 6 (enam) sebagai berikut :

Pada pertanyaan pertama dari responden sebanyak 80 orang PKL diperoleh hasil sebagai berikut : Menyatakan sangat setuju 11 responden = 13,75%, setuju 62 responden = 77,5%, kurang setuju 7 responden = 8,75%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan kedua diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 6 responden = 7,5%, setuju 66 responden = 82,5%, kurang setuju 8 responden = 10%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan ketiga diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat setuju 4 responden = 5%, setuju 59 responden = 73,75%, kurang setuju 17 responden = 21,25%, dan tidak setuju 0 = 0%. Pertanyaan keempat diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat mendukung 17 responden = 21,25%, mendukung 58 responden = 72,5%, kurang mendukung 5 responden = 6,25%, dan tidak mendukung 0 = 0%. Pertanyaan kelima diperoleh hasil sebagai berikut : Sangat meningkat 4 responden = 5%, meningkat 34 responden = 42,5%, kurang meningkat 36 responden = 45%, dan tidak meningkat 6 responden = 7,5%.

Tabel 6 : Jawaban Responden Indikator Pembinaan Usaha Kecil

Pertanyaan	Jawaban Responden dengan Skala dan Prosentase								Total	%
	4	%	3	%	2	%	1	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11	13,75	62	77,5	7	8,75	-	-	80	100
2.	6	7,5	66	82,5	8	10	-	-	80	100
3.	4	5	59	73,75	17	21,25	-	-	80	100
4.	17	21,25	58	72,5	5	6,25	-	-	80	100
5.	4	5	34	42,5	36	45	6	7,5	80	100
Jml.	39		277		77		6		400	
Rata	8,4	10,5	55,8	69,75	14,6	18,25	1,2	1,5	80	100

Sumber : data primer diolah

Dengan demikian diperoleh hasil prosentase rata-rata jawaban responden sebagai berikut : Pertama 69,75% responden setuju, kedua 18,25% responden kurang setuju, ketiga 10,5% responden sangat setuju, dan keempat 1,5% responden menyatakan tidak setuju. Artinya dengan dilakukan Pembinaan Usaha Kecil yang diterapkan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) terhadap PKL di kota Lamongan sebagian besar menyatakan setuju.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan selaku instansi yang membidangi pembinaan dan pengembangan Usaha Industri, Usaha Perdagangan, Penanaman Modal (investasi), dan Koperasi bersana-sama dengan instansi lain yang terkait, mempunyai kewajiban membangun, membina, menumbuhkan serta mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada bidang industri, perdagangan, maupun koperasi. Usaha kecil PKL di kota Lamongan merupakan wewenang bidang perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan segala bentuk program dan kebijakannya yang mengatur / menata, melindungi, membina, mensosialisasikan, menerapkan, dan lain sebagainya pada usaha kecil di Kabupaten Lamongan terutama pada PKL hendaknya

bermuara pada perbaikan ekonomi masyarakat kecil atau yang berpenghasilan rendah dan bukannya malah menambah beban ekonomi masyarakat kecil.

KESIMPULAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan bidang-bidang lain mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan / pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa antara lain : Pedagang Besar, Pedagang Menengah, serta Pedagang Kecil seperti PKL. Tujuan dari penataan, pembinaan, dan pengembangan adalah agar para PKL menjadi maju, tertata rapi (tertib), berkembang, dan meningkat pendapatannya agar dapat menjadi usaha kecil yang mandiri, menengah, maupun besar yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Harapan ini tentunya bukan hanya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dan PKL saja, melainkan milik semua komponen dan lapisan masyarakat Lamongan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Harsiwi, 2002, *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Volume 14.
- Effendi, Noer, 1995, *sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Handoyo, 1997, *Manajemen Modal Kerja*, Yogyakarta, Universitas atma Jaya Yogyakarta.
- Hidayat, 1978, *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*, Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. XXVI, No.4, Desember 1978, Hal. 415 - 443.
- Haryono, Tulus, 1989, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus di Kodya Surakarta (tesis yang tidak dipublikasikan)*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Irawan dan Suparmoko M., 1997, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE Yogyakarta.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong, 1996, *Principles Of Marketing*, Seventh Edition, International Edition, Prentice Hall, Inc., englewood Cliffs, New Jersey.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi (penyunting), 1993, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Papayungan, 1984, *Pembinaan Sektor Informal di Kota*, Demografi Indonesia. No.22, LD-FEUI, Jakarta.
- Soemadi, M. Djelni, 1993, *Usaha Kaki Lima tetap Merupakan “Gantungan Hidup” Bagi Mereka*, Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1993.
- Tjiptono, Fandy, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi Offset, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta.